



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 4 /DPRK-Pidie/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN PIDIE
PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

Menimbang

- : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa salah satu tugas Badan Legislasi DPRK adalah menyusun Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan rancangan Qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Penetapan Program Legislasi Kabupaten Pidie Prioritas Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Pidie Nomor : 180/382 tanggal 6 Februari 2025 perihal Usulan Prolek Tahun 2025;
2. Surat Bupati Pidie Nomor : 100.3/1284 tanggal 2 Mei 2025 perihal Usulan Tambahan Prolek Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Program Legislasi Kabupaten Pidie Prioritas Tahun Anggaran 2025, dengan daftar urutan Rancangan Qanun Prioritas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Urutan rancangan Qanun sebagai Program Legislasi Kabupaten Pidie Prioritas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berasal dari usulan Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBK Pidie.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 6 Mei 2025 M
7 Dzulqaidah 1446 H

/ **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** /
KABUPATEN PIDIE
KETUA,


ANWAR SASTRA PUTRA

Lampiran - Keputusan DPRK Pidie
Nomor : 4 /DPRK-Pidie/2025
Tanggal : 5 Mei 2025

**DAFTAR URUTAN RANCANGAN QANUN SEBAGAI PROGRAM LEGISLASI
KABUPATEN PIDIE PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	RANCANGAN QANUN	KETERANGAN
1	2	3
1	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029	Usulan Bupati
2	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Gerakan Membaca dan Menghafal Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat	Usulan Bupati
3	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Hari Jadi Pidie	Usulan Bupati
4	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Usulan Bupati
5	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Usulan Bupati
6	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Usulan Bupati
7	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Usulan Bupati
8.	Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie	Usulan Bupati

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**



ANWAR SASTRA PUTRA